

**PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA LOMBOK UTARA OLEH DINAS
PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara)**

Dita Kharisma Varamudita,¹ Yaqub Cikusin², Khoiron³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl. MT
Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: rizkyracmansyah41@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui dan mampu mendeskripsikan peran Dinas Pariwisata dalam membangun kawasan Wisata Lombok Utara. (2) Untuk mengetahui dan mampu mendeskripsikan jumlah peningkatan PAD sebelum dan sesudah di tetapkannya PERDA tentang pembangunan kawasan pariwisata. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh. Peneliti juga menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yakni antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Destinasi manajemen organisasi atau DMO adalah sebuah konsep yang kemudian di kaji lalu di kemas dalam bentuk sebuah organisasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pentingnya arah pembangunan yang terkonsep dengan efektif. (2)) penerapan startegi yang yang di terapkan oleh Pemerintah Daerah sendiri sehingga Pendapatan Asli Daerah atau PAD mengalami peningkatan secara signifikan di mana hal tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi yang memfokuskan terhadap Pembangunan Pariwisata.

Kata Kunci : Peran Dinas Pariwisata, Pembangunan kawasan wisata, Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Dengan di berlakukannya UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan

memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan glomal.

Dalam pembangunan pariwisata guna menunjang pendapatan asli daerah atau PAD pada khususnya merupakan pengembangan yang berencana serta menyeluruh sehingga dapat di peroleh manfaat yang optimal bagi pemerintah maupun masyarakat sendiri baik dari segi ekonomi, social budaya, dalam perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program ekonomi dan social suatu wilayah di mana hal tersebut menjadi salah satu unsur perkembangan tempat wisata, salah satu contoh yang di ambil adalah dari beberapa program tempat pariwisata yang akan di teliti oleh peneliti, Adapun beberapa program-

program utama yang di mana menjadi salah satu unsur berkembangnya tempat pariwisata Adapun program-program tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara menganalisa apa yang menjadi kebutuhan wisatawan.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan.
3. Melakukan pembenahan terhadap infrastruktur pembangunan
4. Melestarikan dan werawat SDA.
5. Pameran budaya dalam rangka mengenalkan keragaman wisata yang ada di pulau Lombok.
6. Bekerja sama dengan stakeholder selaku pengelola wisata setiap daerah dengan tujuan agar para wisatawan sering berkunjung ke wisata Lombok Utara karena semakin sering para wisatawan berkunjung maka akan meningkatkan pendapatan daerah.

Dari uraian yang di paparkan di atas oleh peneliti memberikan sebuah gambaran tentang pentingnya peran Dinas Pariwisata dalam membangun kawasan wisata daerah guna meningkatkan PAD, berdasarkan alasan tersebut inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengambil judul tentang Pembangunan kawasan wisata oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan PAD dan peneliti ingin membandingkan jumlah PAD sebelum dan sesudah di tetapkannya PERDA.

Berdasarkan pemaparan di atas sebagai respon dari beberapa serangkaian langkah-langkah dalam pembangunan pariwisata yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok utara, para pengelola kawasan wisata Lombok Utara khususnya Dinas pariwisata dan peran masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam membangun kawasan tersebut serta menarik jumlah wisatawan untuk berkunjung guna meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Utara, masalah dalam kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Perubahan tersebut merupakan implemetasi dari pasal 18 ayat(2) Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: "pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh TrianingsihWidiaty(2014) upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan, hasil penelitian :

- a) Melakukan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pada beberapa obyek wisata

yang ada di Kabupaten Bulungan yang melibatkan semua pihak.

- b) Penelitian yang kedua dilakukan oleh Arfianti Nursa'dah(2015) analisis strategi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, hasil penelitian menunjukkan bahwa:
- c) Adanya wewenang penuh yang di berikan oleh pemerintah setempat terkait dengan adanya kontribusi sektor pariwisata, dinas pariwisata selaku aparat pemerintah dalam pengembangan wisata setempat guna meningkatkan PAD Daerah.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rezi Kurnia Putri (2015) Pengembangan pariwisata oleh dinas pariwisata kota Bukittinggi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata oleh dinas pariwisata kota Bukittinggi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah(PAD) Menurut Riady yang mengutip dalam buku Fatimah (2003:336) perencanaan pembangunan daerah dalam konteks manajemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan. Perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan harus memiliki prinsip-prinsip pembangunan antara lain:

- a. Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki landasan filosofi yang kuat dan mengakar dalam kultur/budaya masyarakat yang ada didaerah.
- b. Perencanaan pembangunan harus bersifat komprehensif, holistik, atau menyeluruh, sehingga mampu membangun aspek-aspek yang akan menjadi satu kesatuan dalam pembangunan.
- c. Perencanaanpembanguna daerah harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang dari wilayah perencanaannya,seperti pusat perkotaan,pedesaan, dan lain sebagainya.
- d. Perencanaan pembangunan daerah yangbersifat,Perencanaan menyokong/memperkuat perencanaan pembangunan secara nasional.Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara harmonis dan mendukung proses pembangunan secara nasional dengan tetap berlandaskan pada kekuatan,potensi, dan kebutuhan daerah itu sendiri.

Pengertian Pembangunan masyarakat

Menurut Mudrajad Kuncoro dalam bukunya yang berjudul Perencanaan pembangunan daerah (2018:14) menyebutkan bahwa Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah: (1) tekanan yang berasal dari lingkungan

dalam negeri ataupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya: (2) kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara di pengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya, sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Dengan Pendapatan Asli Daerah menurut Purnomo (2010:34) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang di pisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan yang berlaku, kebijakan keuangan daerah di arahkan untuk meningkatkan pendapan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat di gunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam pendapatan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi), dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya di lihat dari perspektif yang lebih luas.

Strategi Pengembangan Pariwisata

Menurut Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dengan adanya sektor pemasaran dan promosi tentu sangat menolong dalam hal pembuatan strategi dalam kepariwisataan, antara lain yaitu : Strategi pengembangan produk pariwisata Menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengembangan sarana akomodasi, pengembangan Aksesibilitas atau angkutan wisata, usaha makanan dan minuman, jenis usaha akomodasi menurut peraturan perundangan kepariwisataan masih di kelompokkan menjadi 5 jenis akomodasi

Menurut Suryono (2004, h.80) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana,dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah

harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan.

Menurut Umar (2008:128) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian dalam penggerakan dan pengawasan pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian pemeliharaan, dan keputusan hubungan kerja dengan maksud untuk pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. sarana dan prasarana pariwisata..

Tujuan Wisata Lombok Utara

Pemerintah Lombok utara akhirnya memiliki wewenang yang penuh dalam mengelola daerahnya sehingga konsekuensinya adalah tuntutan dalam peningkatan kemandirian daerah, dalam usaha dan upaya mengembangkan dan membangun daerahnya, pemerintah Lombok utara telah berupaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar target pendapatan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten, Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sebagai lahan yang mampu mendongkrak peningkatan perekonomian sebab dengan mengeksploitasikan keindahan panorama alam akan dapat mengatasi berbagai kesulitan defisit neraca pembayaran, sehingga pembangunan kepariwisataan akan selalu mendatangkan keuntungan untuk perbaikan perekonomian suatu daerah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Menurut (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisim*, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara *purpositive* dan *snowball*, teknik pengumpul dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, dengan demikian di tegaskan kembali bahwa peneliti di tempuh berdasarkan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pembangunan Kawasan Wisata Lombok Utara Oleh Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Mengidentifikasi jumlah pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah di keluarkannya

PERDA No 9 tahun 2011 tentang pembangunan kawasan pariwisata.

2. Peran dinas pariwisata dalam membangun kawasan pariwisata guna meningkatkan PAD.

Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi tempat penelitian yaitu bertempat di Dinas Pariwisata Kabuapten Lombok Utara penelitian rencananya akan di lakukan pada bulan Maret 2020 hingga April 2020. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian ini agar dapat diketahui lebih jelas objek penelitiannya.

Sumber Data

Menurut Umi Narimawati (2008:98) dalam bukunya Metodologi penelian kualitatif dan kuantitatif: Teori dan aplikasi, bahwa data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, atau data yang di peroleh secara langsung di lapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan perbandingan yang di teliti, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah seperti : Kepala Dinas Pariwisata, dan staf dinas pariwisata. pengertian data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer. Lebih diutamakan dari data sekunder. Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.
- b. Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh untk mendukung data primer. Data sekunder ini diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dikarenakan bahwasanya penelitian ini diperlukan pemahaman yang mendalam melalui berinteraksi secara lansung dengan para pihak terkait yang disebut sebagai nara sumber.

- a. Wawancara
- b. Observasi.
- c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-bener terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus.

Pembahasan

Bagaimana perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara sebelum dan sesudah di tetapkannya PERDA tentang pembangunan kawasan pariwisata?

Sebelum PERDA. Pembangunan kurang maksimal pembangunan merupakan sebuah proses atau upaya yang telah di tetapkan secara sadar sebagai suatu hal yang di laksanakan, dimana dalam pelaksanaan pembangunan yang di lakukan secara terencana dalam artian jangka waktu yang panjang dengan mengikut sertakan peran para pelaku pembangunan, merencanakan berarti mengambil sebuah keputusan tentang hal-hal yang akan di lakukan pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang yang mengandung makna pertumbuhan dan perubahan sebagai peningkatan dan bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi.

Destinasi manajemen organisasi atau DMO adalah sebuah konsep yang kemudian di kaji lalu di kemas dalam bentuk sebuah organisasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pentingnya arah pembangunan yang terkonsep dengan efektif. Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan kawasan wisata adalah membentuk strategi. dapat menumbuhkan rasa ingin berubah, mengalih potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

Sesudah di tetapkannya PERDA. Peningkatan Pendapatn Asli Daerah atau PAD Berdasarkan data yang didapat dilapangan bahwasanya sini Dinas pariwisata Kabupaten Lombok Utara memiliki peran utama dalam membangun serta mengelola kawasan wisata, dinas pariwisata bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyusunan rencana kerja di dinas pariwisata, merumuskan sebuah kebijakan atau teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pasal 18 ayat (2) Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantunya. Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantunya.

Adapun yang menjadi dasar dalam suatu pembangunan khususnya pembangunan daerah pariwisata yaitu adanya sebuah prinsip yang di jalani dengan kuat sehingga terkelola dengan baik dan efektif, adapun yang menjadikan pemerintah daerah ataupun masyarakat setempat khususnya Lombok Utara terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan kawasan pariwisata yaitu adanya perbandingan PAD sebelum dan sesudah di tetapkannya PERDA No 9 Tahun 2011 tersebut. Sesuai dengan pendapat Pasal 18 ayat (2) Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantunya.

Mengapa pendapatan Asli Daerah Bisa Mengalami Peningkatan

Adapun yang menjadi tolak ukur perkembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara yaitu dengan meningkatnya jumlah hotel dan restoran / kuliner. Jumlah hotel berbintang dan hotel melati di Kabupaten Lombok Utara mencapai 610 hingga pada tahun 2018. Pemaparan strategi yang perlu di lakukan sesuai dengan intruksi Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu : Pertama Strategi pengembangan produk pariwisata jadi di maksud di sini adalah adanya langkah-langkah yang harus di lakukan untuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengembangan sarana akomodasi, pengembangan aksesibilitas atau angkutan wisata, usaha makanan dan minuman.

Kedua pengembangan pasar, yang di maksud di sini adalah merumuskan orientasi pasar yang akan diraih dan langkah-langkah yang perlu di lakukan untuk meraih pasar tersebut dengan mempertimbangkan jenis dan potensi obyek dan daya tarik potensial yang ada serta bentuk pariwisata yang di kembangkan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah di tetapkannya Peraturan Daerah No 9 Tahun 2011 tentang pembangunan kawasan pariwisata :
 - a. Sebelum PERDA, pembangunan merupakan sebuah proses atau upaya yang telah di tetapkan secara sadar sebagai suatu hal yang di laksanakan, dimana

dalam pelaksanaan pembangunan yang di lakukan secara terencana dalam artian jangka waktu yang panjang dengan mengikut sertakan peran para pelaku pembangunan, merencanakan berarti mengambil sebuah keputusan tentang hal-hal yang akan di lakukan pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang yang mengandung makna pertumbuhan dan perubahan sebagai peningkatan dan bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi.

- b. Sesudah PERDA, bahwa adapun yang menjadi dasar dalam suatu pembangunan khususnya pembangunan daerah pariwisata yaitu adanya sebuah prinsip yang di jalani dengan kuat sehingga terkelola dengan baik dan efektif, adapun yang menjadikan pemerintah daerah ataupun masyarakat setempat khususnya Lombok Utara terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan kawasan pariwisata yaitu adanya perbandingan PAD sebelum dan sesudah di tetapkannya PERDA No 9 Tahun 2011.
2. PAD bisa mengalami peningkatan karena adanya pencapaian target yang di targetkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di katakan sudah mencapai tingkat maksimal hal tersebut bisa kita lihat dari hasil penerapan startegi yang yang di terapkan oleh Pemerintah Daerah sendiri sehingga Pendapatan Asli Daerah atau PAD mengalami peningkatan secara signifikan di mana hal tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi yang memfokuskan terhadap Pembangunan Pariwisata, meskipun ada beberapa hal yang harus di tingkatkan kembali.

Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pembangua kawasan wisata Lombok utara oleh donas pariwisata, maka diajukan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah daerah kabupaten lombok utara supaya lebih memperhatikan kembali lokasi-lokasi wisata yang masih belum dikunjungi oleh wisatawan, dan pentingnya promosi yang besar baik dari pemerintah daerah ataupun masyarakat supaya lebih ditingkatkan agar wisatawan dapat mengetahui lokasi wisata yang masih tersembunyi atau masih belum di publikasikan.

- 2) Pemerintah daerah khususnya Lombok Utara di sarankan untuk tidak hanya membangun sarana dan prasarana pendukung pariwisata, namun juga mengupayakan untuk menyediakan dana pemeliharaan yang memadai guna menjaga prasarana yang sudah di bangun serta menindak tegaskan kembali bagi para oknum pengusaha yang masih enggan membayar pajak, dan bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi di harapkan untuk mengkaji lebih luas tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan pariwisata guna meningkatkan PAD.

<https://lombokutarakab.go.id/v1/pemerintahan/skpd-unit-kerja/badan-dinas-kantor/9-sample-data-article/172-badan-pendapatan-daerah> (Di akses pada tanggal 3 November 2019,02:00)

Daftar Pustaka

- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Handoko,T.Hani1996.*Manajemen perencanaan dan sumber daya manusia* .Yogyakarta:PT BPEE
- Afifuddin.2015. *Pengantar administari pembangunan*. Bandung : Alfabeta
- Wardianti.2006.*Metode penelitian pariwisata*. Yogyakarta:Andi
- Adisamita, Rahardjo.2006.*Pembanguna pedesaan dan perkantoran* Yogyakarta:Graha Ilmu
- Wahab.2003. *Metode penelitian pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Bodgan dan Taylor. 1975 dalam J. Moleong Lexy. 1989. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Karya
- UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Dasar hukum UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- UU Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 20 dan Pasal 21 kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
- Wisnu imam.2018.”*Pengembangan infrastrukturisasi Gili Matra dalam mningkatkan pendapatan asli daeah Kabupaten Lombok Utara*”.Skripsi:Universitas Islam Malang
- Trianingsih Widiaty.2016.”*Upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan*.”Skripsi:Universitas terbuka
- Pokdarwis.2017.*Pengembangan desa wisata desa membangun indonesi*.”Artikel: Dinas Pariwisata
- Inayatulaii.2019. *Karakteristik penilaian pembangunan kawan Kabuapten Lombok Utara* .” Artikel: Universitas Islam Malang
<https://indopos.co.id/read/2018/06/19/141600/pariwisata-tambang-pad-terbesar-lombok-utara>. (Di akses pada tanggal 14 oktober 2019, 9:30)
- [http://mata air –wedjet- kakong.Business.Side](http://mata-air-wedjet-kakong.business.side) (Di akses pada tanggal 4 oktober 2019, 11:45)